

Ahmad Fauzi¹

**IMPLEMENTASI PENGERAJAAN SURAT
PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)
MEMANFAATKAN GOOGLE FORM DAN GOOGLE
SHEETS DI DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMBERINTAH DESA
KABUPATEN KEDIRI**

Abstrak

Implementasi pengelolaan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) menggunakan Google Form dan Sheets di Dinas PMPD Kabupaten Kediri merepresentasikan upaya transformasi digital dalam administrasi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan SPJ menggunakan Google Form dan Sheets untuk meningkatkan efisiensi administratif. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Google Form dan Sheets untuk pengelolaan SPJ telah berhasil meningkatkan efisiensi administrasi, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam hal adaptasi teknologi dan kompetensi pengguna. Sistem digital ini telah membantu mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan SPJ konvensional seperti kesulitan pengarsipan, keterlambatan pelaporan, dan potensi kesalahan pencatatan. Implementasi ini menunjukkan pentingnya dukungan infrastruktur teknologi dan pelatihan SDM sebagai faktor kunci dalam keberhasilan transformasi digital di administrasi pemerintahan.

Kata Kunci: Administrasi Digital, Pengelolaan SPJ, Inovasi Pemerintahan

Abstract

The implementation of SPJ (Letter of Accountability) management using Google Form and Sheets at the PMPD Office of Kediri Regency represents a digital transformation effort in government administration. This study aims to analyze the implementation of SPJ management using Google Form and Sheets to improve administrative efficiency. Using a qualitative descriptive approach, data was collected through participatory observation, interviews, and documentation. The results show that the implementation of Google Form and Sheets for SPJ management has successfully improved administrative efficiency, although some challenges remain in terms of technological adaptation and user competency. The digital system has helped overcome various obstacles in conventional SPJ management such as archiving difficulties, reporting delays, and potential recording errors. This implementation demonstrates the importance of technological infrastructure support and human resource training as key factors in successful digital transformation in government administration.

Keywords: Digital Administration, SPJ Management, Government Innovation

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, transformasi teknologi informasi telah menjadi kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan(Natika, 2024). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMRD) Kabupaten Kediri sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa,

¹ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
email: ahmadfauzif261@gmail.com

menghadapi tantangan dalam pengelolaan administrasi, khususnya dalam pengelolaan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

Pengelolaan SPJ secara konvensional seringkali menghadapi berbagai kendala seperti kesulitan dalam pengarsipan, keterlambatan pelaporan, dan potensi kesalahan dalam pencatatan data(Utami et al., 2024). Hal ini mendorong DPMPD Kabupaten Kediri untuk mengimplementasikan sistem pengelolaan SPJ berbasis teknologi menggunakan Google Form dan Google Sheets sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi.

Berdasarkan hasil observasi di Dinas PMPD Kabupaten Kediri, ditemukan beberapa permasalahan utama dalam pengelolaan SPJ. Salah satunya adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman perangkat DPMPD terhadap pemanfaatan Google Form dan Google Sheets, yang berakibat pada rendahnya efisiensi kerja dalam penyelesaian tugas administratif. Tanpa pemanfaatan teknologi yang tepat, banyak proses yang dilakukan secara manual, menghambat kelancaran pekerjaan serta meningkatkan potensi terjadinya kesalahan.

Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk sebuah sistem yang dapat membantu mengelola volume dokumen SPJ yang cukup besar, agar tercipta tertib administrasi yang lebih baik. Sistem pengarsipan berkas SPJ dan alat tulis kantor (ATK) yang masih manual membuat pencarian dan pengelolaan dokumen menjadi sulit dan memakan waktu. Di sisi lain, kompleksitas dalam pencatatan dan monitoring dana nota Bank Jatim, serta rekapitulasi honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara, memperburuk situasi, mengingat banyaknya data yang harus dicatat dan diverifikasi secara akurat.

Untuk itu, implementasi sistem pengelolaan SPJ berbasis teknologi dengan memanfaatkan Google Form dan Google Sheets menjadi solusi yang tepat. Penggunaan kedua alat tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi, mempercepat proses pengolahan data, serta mengurangi risiko kesalahan dalam penggerjaan data pendukung dan penyusunan SPJ. Dengan sistem yang lebih terstruktur dan berbasis teknologi, diharapkan Dinas PMPD Kabupaten Kediri dapat mengelola administrasi dengan lebih baik dan lebih teratur.

Penelitian yang dilakukan (Asqia & Nabarian, 2021) Google Sheets dan Google Form menjadi pilihan karena sistem penyimpanan berbasis Cloud dan dapat digunakan oleh siapa pun tanpa terbatas tempat dan waktu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah electronic Service Quality (E-SQ) dan User Acceptance Test (UAT) sebagai pengujinya serta kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Dimensi yang dipakai dalam E-SQ adalah efficiency, fulfilment dan system available.

Penelitian lain yang dilakukan (Dewi et al., 2022) Dalam hal ini tim pengabdi melakukan program kerja pemanfaatan media berupa form kendali administrasi guna mewujudkan tertib administrasi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali, dimana hasil dari kegiatan ini yakni terdapat perubahan dalam tindak lanjut kekurangan laporan pertanggungjawaban menjadi lebih baik lagi. Kedepannya diharapkan instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selalu melakukan monitoring terhadap tindak lanjut kekurangan laporan pertanggungjawaban ini agar bisa mempertahankan tertib administrasi.

Penelitian lain yang dilakukan (Ikhsan et al., 2022) Dampak adanya pandemic Covid-19 membuat perangkat desa harus menemukan cara melayani masyarakat dengan mudah dan aman, selain itu penyimpanan data masih menggunakan penyimpanan lokal dengan menggunakan flashdisk, hardisk sehingga berisiko data hilang dan terkena virus. Tim pengabdian masyarakat: Amikom Mitra Masyarakat (AMM) berencana memberikan pelatihan penggunaan Google Form dan Google Drive. Pelatihan Google Form untuk dapat dimanfaatkan perangkat desa dalam melayani masyarakat di bagian administrasi, sedangkan Pelatihan Google Drive untuk dapat dimanfaatkan perangkat desa dalam menyimpan dan membackup data secara cloud sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Metode yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu penjelasan materi dilanjutkan dengan pelatihan dan praktik langsung pada masing-masing peserta. Kegiatan pelatihan ini berjalan dengan baik dan langsung diperaktikkan oleh perangkat desa untuk membantu pekerjaan administrasi di desa.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) sebagai kerangka analisis(Rozaki & Suhartono, 2024). Dalam teori ini, terdapat enam variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yang saling berkaitan dan perlu diperhatikan dalam penerapan sistem pengelolaan SPJ di Dinas PMPD Kabupaten Kediri.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam proses implementasi sistem pengelolaan SPJ di Dinas PMPD Kabupaten Kediri. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam pengoperasian sistem dan mengamati proses implementasi secara langsung. Selain itu, dokumentasi dilakukan dengan mencatat alur kerja sistem serta mengumpulkan data terkait penggunaan sistem. Wawancara juga dilakukan dengan pengguna sistem dan tim implementasi untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut mengenai tantangan dan pengalaman mereka dalam menggunakan sistem tersebut. Penelitian ini dilaksanakan antara bulan September 2024 hingga Januari 2025 di Dinas PMPD Kabupaten Kediri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk dapat memaparkan Implementasi SPJ menggunakan Google Form dan Sheets di Dinas PMPD Kabupaten Kediri, berikut adalah hasil analisis berdasarkan beberapa indikator:

Persiapan Penggunaan Google Form dan Sheets untuk SPJ

Pertanggungjawaban (SPJ) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri dimulai dengan pemahaman terhadap kebutuhan utama dalam meningkatkan efisiensi administrasi. Sistem berbasis teknologi ini dirancang untuk mempermudah pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data SPJ, serta mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik yang rentan terhadap kerusakan dan kesalahan administrasi. Langkah pertama dalam implementasi adalah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan berperan sebagai operator sistem. SDM ini dibekali dengan pelatihan terkait penggunaan Google Form, Google Sheets, dan Google Drive untuk memastikan mereka dapat mengoperasikan sistem dengan baik. Pelatihan ini mencakup cara membuat dan mengelola form untuk input data SPJ, serta mengolah data di Google Sheets.

Selain pelatihan bagi operator, penting untuk memastikan bahwa infrastruktur teknologi yang mendukung sistem ini tersedia dengan baik. Ketersediaan jaringan internet yang stabil, perangkat komputer, dan alat pendukung lainnya menjadi faktor penentu dalam kelancaran implementasi. Karena sistem berbasis cloud, pengguna dapat mengakses data dan dokumen kapan saja dan dari mana saja, yang meningkatkan fleksibilitas dan mempermudah kolaborasi antar bagian dalam pengelolaan SPJ. Salah satu keuntungan utama menggunakan Google Drive sebagai tempat penyimpanan adalah kemudahan akses dan pengamanan data dengan fitur berbasis cloud yang aman dan mudah diatur.

Dalam implementasinya, Google Form digunakan sebagai sarana untuk menginput data SPJ secara efisien. Setiap entri SPJ yang masuk akan tercatat langsung dalam Google Sheets, yang berfungsi sebagai platform untuk pengolahan data secara otomatis. Google Sheets memungkinkan data yang terkumpul dapat langsung dianalisis dan dilaporkan dengan lebih cepat. Sistem ini juga mengurangi kemungkinan kesalahan input data yang sering terjadi pada pengelolaan secara manual, karena proses input data dilakukan secara langsung melalui form yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan administrasi SPJ.

Secara keseluruhan, implementasi sistem pengelolaan SPJ berbasis Google Form dan Sheets ini memberikan banyak keuntungan, seperti efisiensi waktu, penghematan biaya, dan peningkatan akurasi dalam pengelolaan administrasi. Dengan menggunakan teknologi berbasis cloud, Dinas PMPD Kabupaten Kediri dapat memastikan bahwa data SPJ dapat dikelola secara terpusat, terstruktur, dan aman. Ke depan, pengelolaan SPJ yang lebih terintegrasi ini diharapkan dapat mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan pelaporan SPJ.

Alur Penerapan Sistem SPJ Digital

Mekanisme penggunaan Google Form dan Sheets untuk pengelolaan SPJ dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembuatan template form input data SPJ menggunakan Google Form: Template form SPJ dibuat dengan menentukan kolom-kolom data yang diperlukan seperti tanggal transaksi, keterangan pengeluaran, nominal, dan dokumen pendukung.
2. Pengisian data SPJ oleh perangkat dinas melalui form yang telah disediakan: Perangkat dinas mengisi form SPJ dengan informasi yang sesuai, mengikuti format yang telah ditentukan.
3. Data secara otomatis terintegrasi ke Google Sheets untuk pengolahan lebih lanjut: Setelah form diisi, data yang terkumpul langsung terintegrasi ke Google Sheets untuk analisis dan pengolahan lebih lanjut.
4. Penyimpanan dokumen pendukung di Google Drive dengan sistem pengorganisasian yang terstruktur: Dokumen pendukung SPJ disimpan di Google Drive dengan sistem folder yang terstruktur untuk memudahkan akses dan pengelolaan.
5. Verifikasi dan monitoring data SPJ oleh pejabat berwenang: Pejabat berwenang melakukan verifikasi dan monitoring data SPJ yang telah diinput untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan informasi.

Dukungan terhadap kegiatan pendataan dilakukan dengan pengisian sesuai format yang telah ditetapkan oleh DPMRD Kabupaten Kediri yang memuat: tanggal transaksi, keterangan pengeluaran, nominal, dan dokumen pendukung.

Manfaat Implementasi Sistem SPJ Digital

Implementasi sistem pengelolaan SPJ berbasis Google Form dan Sheets memberikan beberapa manfaat:

1. Meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi dan pengarsipan SPJ: Dengan menggunakan Google Form dan Sheets, proses pengumpulan data menjadi lebih cepat dan otomatis, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengolah data SPJ secara manual. Data yang sebelumnya mungkin membutuhkan penginputan dan pengarsipan fisik, kini dapat dilakukan dengan lebih efisien dalam bentuk digital, menghemat waktu dan tenaga.
2. Memudahkan monitoring dan verifikasi data SPJ: Karena data SPJ terintegrasi langsung dalam Google Sheets, pejabat berwenang dapat dengan mudah memantau dan memverifikasi data yang masuk. Fitur seperti filter, pencarian, dan kolaborasi secara real-time memungkinkan proses verifikasi dilakukan dengan lebih cepat dan transparan tanpa perlu mencari data di tumpukan dokumen fisik.
3. Mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan: Penggunaan sistem berbasis digital seperti Google Form dan Sheets mengurangi kemungkinan kesalahan manusia, seperti salah ketik atau penghitungan yang tidak akurat. Dengan format yang sudah disesuaikan, data yang dimasukkan akan langsung terstruktur, dan perhitungan di Google Sheets bisa dilakukan secara otomatis menggunakan rumus, meminimalkan potensi kesalahan.
4. Mempercepat proses pelaporan dan pertanggungjawaban: Dengan sistem yang terintegrasi, laporan SPJ dapat dihasilkan dengan cepat dan tepat. Data yang sudah masuk dalam Google Sheets dapat langsung dianalisis, dan laporan dapat segera disiapkan tanpa harus menunggu proses manual. Hal ini mempercepat pelaporan kepada atasan atau pihak terkait dalam waktu yang lebih singkat.
5. Menciptakan sistem pengarsipan yang lebih terstruktur dan mudah diakses: Google Drive memberikan solusi pengarsipan yang lebih terstruktur, dengan sistem folder yang dapat diatur sesuai kategori dan kebutuhan. Semua dokumen pendukung SPJ dapat disimpan secara digital, mudah diakses, dan tidak khawatir kehilangan dokumen fisik. Pengguna dapat dengan mudah mencari dan membuka dokumen yang diperlukan kapan saja dan dari mana saja.

Kendala dan Upaya Penanganan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem ini antara lain:

1. Gap Teknologi (Perangkat Dinas Belum Familiar dengan Google Form dan Sheets) : Salah satu kendala utama dalam implementasi sistem pengelolaan SPJ berbasis Google Form dan

Sheets adalah adanya gap teknologi. Beberapa perangkat dinas mungkin belum terbiasa dengan alat-alat berbasis digital seperti Google Form dan Sheets, karena mereka lebih sering menggunakan metode manual atau berbasis aplikasi lain yang lebih konvensional. Hal ini membuat beberapa perangkat kesulitan untuk memahami bagaimana menggunakan platform baru ini secara efektif. Selain itu, ketidaknyamanan dalam beradaptasi dengan teknologi baru juga bisa mempengaruhi tingkat adopsi dan produktivitas dalam jangka pendek.

2. Keterbatasan Pemahaman dalam Penyusunan Format SPJ Digital : Meskipun penggunaan Google Form dan Sheets relatif mudah, namun pengelolaan format SPJ yang sesuai dengan standar dan regulasi yang ada memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang struktur dan kebutuhan administrasi. Beberapa perangkat mungkin kesulitan dalam menyusun format yang benar, seperti bagaimana menyusun kolom-kolom yang dibutuhkan dalam form input data SPJ, atau bagaimana memanfaatkan rumus dan fitur otomatis dalam Google Sheets untuk mempermudah perhitungan dan pelaporan. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Kendala Jaringan Internet yang Terkadang Tidak Stabil: Karena sistem ini berbasis cloud, stabilitas jaringan internet menjadi faktor yang sangat penting. Di beberapa daerah atau lokasi di dalam Dinas PMPD Kabupaten Kediri, kondisi jaringan internet mungkin tidak selalu stabil, yang menyebabkan gangguan saat pengisian form, pengolahan data di Google Sheets, atau penyimpanan dokumen di Google Drive. Ketidakstabilan internet juga dapat menyebabkan kesulitan dalam mengakses data secara real-time atau bahkan kehilangan data yang sedang diolah jika koneksi terputus saat proses pengisian berlangsung.
4. Resistensi terhadap Perubahan Sistem dari Manual ke Digital: Perubahan sistem yang tadinya manual menjadi berbasis digital seringkali menghadapi resistensi dari sejumlah perangkat dinas yang lebih nyaman dengan metode tradisional. Beberapa perangkat mungkin merasa cemas atau ragu-ragu untuk beralih ke sistem digital karena takut terjadi kesalahan atau ketidakpahaman dalam menggunakan sistem baru. Selain itu, kebiasaan lama yang telah berjalan bertahun-tahun membuat mereka enggan untuk mengadopsi perubahan, meskipun sistem digital menawarkan efisiensi dan kemudahan yang lebih besar.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah:

1. Memberikan Pelatihan dan Pendampingan Intensif kepada Perangkat Dinas : Untuk mengatasi gap teknologi, langkah pertama yang dilakukan adalah memberikan pelatihan yang intensif dan mendalam kepada perangkat dinas terkait. Pelatihan ini tidak hanya mencakup dasar penggunaan Google Form dan Sheets, tetapi juga penjelasan tentang manfaat sistem digital untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan mereka. Selain itu, pendampingan secara langsung dalam proses pengisian data atau pembuatan laporan SPJ juga dilakukan untuk memastikan perangkat dinas merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam menggunakan teknologi ini.
2. Menyusun Panduan Penggunaan Sistem yang Detail dan Mudah Dipahami : Untuk mengatasi keterbatasan pemahaman dalam penyusunan format SPJ digital, Dinas PMPD Kabupaten Kediri menyusun panduan penggunaan yang sangat detail dan mudah dipahami oleh semua perangkat dinas. Panduan ini mencakup langkah-langkah praktis dalam membuat form, mengisi data, serta pengolahan dan pelaporan data di Google Sheets. Panduan tersebut disajikan dengan bahasa yang jelas dan disertai contoh konkret agar perangkat dinas dapat mengikuti dengan mudah. Selain itu, dalam panduan ini juga dijelaskan cara mengatasi masalah umum yang mungkin timbul selama penggunaan sistem.
3. Meningkatkan Infrastruktur Teknologi dan Jaringan Internet: Untuk mengatasi masalah jaringan internet yang tidak stabil, Dinas PMPD Kabupaten Kediri berupaya meningkatkan infrastruktur teknologi yang ada. Peningkatan ini mencakup penyediaan jaringan internet yang lebih stabil dan lebih cepat di setiap titik akses yang digunakan untuk pengelolaan SPJ. Selain itu, perangkat keras seperti komputer atau laptop yang digunakan juga diperbarui untuk memastikan bahwa sistem dapat dijalankan dengan optimal. Jika ada daerah yang masih kesulitan dalam akses internet, pihak dinas bisa menyediakan solusi seperti jaringan cadangan atau mengadakan pelatihan di tempat dengan koneksi yang lebih baik.

- Melakukan Sosialisasi Mengenai Manfaat dan Kemudahan Sistem Digital: Untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan sistem, dilakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai manfaat dan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem digital. Sosialisasi ini tidak hanya menjelaskan bagaimana sistem bekerja, tetapi juga memaparkan keuntungan jangka panjang seperti efisiensi waktu, pengurangan kesalahan, dan kemudahan akses data. Dinas PMPD Kabupaten Kediri juga melibatkan perangkat dinas dalam diskusi terbuka untuk mengatasi kekhawatiran atau pertanyaan yang mungkin timbul seputar penggunaan sistem baru ini. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem digital yang baru.

Evaluasi implementasi menunjukkan bahwa meski masih terdapat beberapa kendala, sistem pengelolaan SPJ berbasis Google Form dan Sheets telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi di Dinas PMPD Kabupaten Kediri.

Analisis Berdasarkan Teori Implementasi Van Meter dan Van Horn

Implementasi sistem pengelolaan SPJ menggunakan Google Form dan Sheets di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Kediri dapat dianalisis menggunakan enam variabel utama teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang dikenal sebagai A Model of the Policy Implementation Process. sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Implementasi sistem pengelolaan SPJ digital bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah. Standar yang ditetapkan meliputi penetapan format seragam pengerjaan SPJ digital, sehingga setiap bidang diharapkan menggunakan format yang sama untuk memudahkan verifikasi dan pelaporan. Selain itu, terdapat target waktu yang jelas untuk penyelesaian input data dan verifikasi, serta standar kelengkapan dokumen pendukung yang wajib diunggah. Sasaran dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi waktu pengerjaan dan meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan SPJ, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi administrasi secara keseluruhan. Kejelasan dalam standar ini sangat penting untuk membantu perangkat dinas memahami ekspektasi yang harus dicapai dan memastikan kelancaran penggunaan sistem baru.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi sistem pengelolaan SPJ digital sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dari segi teknologi maupun manusia. Infrastruktur teknologi yang memadai, seperti komputer, jaringan internet, dan perangkat pendukung lainnya, sangat penting untuk kelancaran operasional sistem. Selain itu, sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten, termasuk operator sistem yang dapat mengoperasikan aplikasi digital dengan baik, juga menjadi kunci sukses implementasi. Anggaran yang cukup untuk pengembangan sistem serta pelatihan kepada perangkat dinas juga tidak kalah penting. Dinas PMPD Kabupaten Kediri telah menyediakan infrastruktur dasar, namun masih perlu melakukan peningkatan, terutama terkait dengan stabilitas jaringan internet dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dengan sistem digital yang baru.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi memegang peranan penting dalam memastikan kesuksesan implementasi sistem SPJ digital. Sosialisasi yang efektif mengenai penggunaan sistem baru harus dilakukan kepada seluruh perangkat dinas untuk memastikan bahwa semua pihak memahami cara kerja sistem ini. Selain itu, koordinasi antar bidang sangat penting agar format yang digunakan seragam dan tidak terjadi ketidaksesuaian antar laporan. Proses penyampaian feedback dan evaluasi sistem juga harus berjalan lancar untuk terus meningkatkan sistem. Komunikasi yang terbuka mengenai kendala yang dihadapi serta solusi yang diberikan akan sangat mendukung kelancaran implementasi. Meski efektivitas komunikasi sudah cukup baik dalam meminimalkan resistensi terhadap perubahan, masih diperlukan penguatan koordinasi antar bidang agar sistem dapat berjalan lebih optimal.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

DPMPD Kabupaten Kediri sebagai agen pelaksana memiliki beberapa karakteristik yang mendukung implementasi sistem digital. Struktur organisasi yang jelas dan mendukung implementasi teknologi menjadi dasar penting dalam distribusi tugas dan tanggung jawab.

Pembagian tugas yang terstruktur dengan baik memungkinkan setiap pihak mengetahui peran dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan SPJ digital. Selain itu, budaya organisasi yang terbuka terhadap inovasi juga memainkan peran besar dalam mempercepat adaptasi terhadap sistem baru. Komitmen pimpinan dalam mendukung transformasi digital melalui kebijakan dan keputusan yang mendukung proses ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Dengan karakteristik ini, perangkat dinas lebih mudah untuk beradaptasi dan menerima sistem digital yang baru.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi sistem SPJ digital. Tuntutan efisiensi administrasi yang semakin tinggi di era digital mendorong pemerintah untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang ada. Dukungan kebijakan pemerintah terhadap transformasi digital menjadi faktor yang sangat mendukung penerapan sistem ini di lingkungan pemerintahan. Ketersediaan infrastruktur teknologi di wilayah kerja juga menjadi elemen penting dalam mendukung implementasi sistem yang optimal. Selain itu, kesiapan masyarakat untuk menerima pelayanan berbasis digital juga mempengaruhi penerimaan terhadap sistem ini. Secara keseluruhan, kondisi sosial, ekonomi, dan politik saat ini menciptakan momentum yang tepat bagi penerapan sistem digital yang lebih efisien dan modern di sektor pemerintahan.

6. Disposisi Implementor

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan menjadi faktor penentu dalam kesuksesan implementasi sistem SPJ digital. Kesediaan perangkat dinas untuk mempelajari dan menguasai sistem baru menunjukkan adanya kesiapan untuk berubah. Komitmen mereka untuk mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan juga sangat penting agar sistem berjalan dengan baik. Responsivitas terhadap kendala yang muncul serta adanya masukan dari perangkat dinas untuk perbaikan sistem akan membantu proses implementasi berjalan lancar. Selain itu, konsistensi dalam menggunakan sistem digital juga penting untuk memastikan bahwa perubahan ini dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Meskipun beberapa perangkat dinas yang terbiasa dengan sistem manual masih menunjukkan resistensi, disposisi positif mayoritas pelaksana kebijakan sudah sangat membantu mempercepat adopsi sistem baru ini.

Analisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem pengelolaan SPJ digital di Dinas PMPD Kabupaten Kediri ditentukan oleh interaksi keenam variabel tersebut. Meskipun masih terdapat beberapa kendala, terutama dalam hal sumber daya dan karakteristik agen pelaksana, namun dengan standar yang jelas, komunikasi yang efektif, dan disposisi implementor yang positif, sistem ini telah menunjukkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan administrasi SPJ.

SIMPULAN

Implementasi sistem pengelolaan SPJ menggunakan Google Form dan Sheets di Dinas PMPD Kabupaten Kediri telah berhasil meningkatkan efisiensi administrasi melalui pengurangan waktu pengerjaan, minimalisasi kesalahan pencatatan, dan kemudahan akses data. Meski masih terdapat kendala seperti gap teknologi dan resistensi terhadap perubahan, upaya pelatihan intensif dan pendampingan berkelanjutan telah membantu perangkat dinas beradaptasi dengan sistem baru.

Dalam konteks penerapan jangka panjang, sistem ini telah menunjukkan potensi signifikan dalam transformasi digital administrasi pemerintahan. Penggunaan Google Form dan Google Sheets telah menciptakan sistem pengarsipan yang lebih terstruktur, mempercepat proses pelaporan, dan meningkatkan akurasi data. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi pemerintahan melalui adopsi teknologi digital merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem kedepannya adalah:

1. Melakukan pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi perangkat dinas dalam

- penggunaan Google Form dan Sheets, sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan fitur-fitur yang tersedia.
2. Memperkuat infrastruktur teknologi terutama jaringan internet untuk mendukung kelancaran penggunaan sistem.
 3. Mengembangkan panduan penggunaan sistem yang lebih komprehensif dan mudah dipahami oleh semua level pengguna.
 4. Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi sistem untuk mengidentifikasi area-area yang masih perlu ditingkatkan.
 5. Membangun sistem backup data yang lebih terstruktur untuk menjamin keamanan data SPJ.
 6. Meningkatkan koordinasi antar bidang untuk memastikan konsistensi dalam penggunaan sistem dan format pelaporan.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan implementasi sistem pengelolaan SPJ berbasis Google Form dan GSheets dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi Dinas PMPD Kabupaten Kediri.

DAFTAR PUSTAKA

- Asqia, M., & Nabarian, T. (2021). Pemanfaatan Google Sheets dan Google Form untuk Layanan Administrasi Mahasiswa Menggunakan Konsep Electronic Service Quality. *Jurnal Teknologi Terpadu*, 7(1), 15–22. <https://doi.org/10.54914/jtt.v7i1.339>
- Dewi, P. A. P., Wardani, K. D. K. A., & Gorda, A. A. N. E. S. (2022). PEMANFAATAN FORM KENDALI ADMINISTRASI GUNA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI SPJ DI LINGKUNGAN BKKBN PROVINSI BALI. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4).
- Hafid, H., Barnoto, B., & Abuhsin, J. (2022). Manajemen Pembelajaran Kelas Digital Berbasis Google Workspace for Education. *Kharisma: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 1(1), 48-58.
- Ikhsan, A. N., Alifian, R. S., & Astri, D. N. (2022). PELATIHAN PENGGUNAAN GOOGLE FORM DAN GOOGLE DRIVE UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI DI DESA KARANGNANGKA. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(3), 1199. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i3.10069>
- Maulana, I. N. H., Sholihah, Q., & Wike, W. (2022). Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), 136-144.
- Mulatsih, B. (2020). Penerapan aplikasi Google Classroom, Google Form, dan Quizizz dalam pembelajaran kimia di masa pandemi Covid-19. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 5(1), 16-26.
- Natika, L. (2024). TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI ERA DIGITAL: MENUJU PELAYANAN MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK. *The World of Public Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v6i1.2040>
- Rozaki, J. M., & Suhartono, B. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENILAIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA SATKER KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2022. *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 6(1).
- Sahupala, M. I. (2020). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di dinas lingkungan hidup Kota Tasikmalaya (studi di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(4), 152.
- Santoso, P., & Ningtias, I. S. (2022). Implementasi Kebijakan Anggaran Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Bandung Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 9(2), 79-95.
- Sinaga, S. M., Hamdi, M., Wasistiono, S., & Lukman, S. (2020). Implementasi Kebijakan Angkutan Umum Massal Berbasis Bus Rapid Transit (BRT) Dalam Mewujudkan Sistem Transportasi Publik Perkotaan Yang Berkeadilan Dan Berkelaanjutan Di Provinsi DKI Jakarta. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 2(3), 203-220.
- Utami, A. S. F., Tabrani, M., Zulnisa, M. K., & Prasetyo H, F. (2024). Implementasi Metode Waterfall dalam Sistem Informasi Inventarisasi Barang Berbasis Web pada Kecamatan Johar

- Baru. INFORMATION MANAGEMENT FOR EDUCATORS AND PROFESSIONALS : Journal of Information Management, 9(2), 111. <https://doi.org/10.51211/imbi.v9i2.3224>
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan, 30(2), 129-153.
- Yusron, R. M., Wijayanti, R., & Novitasari, A. T. (2020). Pelatihan pembuatan google form bagi guru SD sebagai media evaluasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) masa pandemi. Jurnal Publikasi Pendidikan, 10(3), 182-188